

Sultan: Sekolah Tatap Muka Tunggu Evaluasi Perkuliahan di Kampus



ANTARA/Luqman Hakim
Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pembukaan sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 dari perkuliahan di perguruan tinggi.

"Kita lihat risikonya bagaimana. Kita lihat dulu beberapa kampus kan sudah masuk tatap muka," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (23/11).

Menurut dia, pada November 2020, beberapa kampus di DIY mulai menyelenggarakan perkuliahan tatap muka. "Kita li-

hat perkembangannya, kasihan anak-anak itu, biar lihat yang dewasa dulu saja," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.

Sultan mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah di DIY memang dimungkinkan dimulai pada Februari 2021 bersamaan awal semester genap. Namun demikian, selain melihat hasil evaluasi dari perguruan tinggi, kondisi risiko penularan COVID-19 di daerah ini tetap menjadi pertimbangan utama. "Dimungkinkan untuk (tatap muka) bulan Februari. Dilihat kondisi riil di lapangan saja, zona merah atau tidak," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadaranta Baskara Aji mengatakan apabila pembelajaran tatap muka di kampus berjalan dengan baik dan aman, kemungkinan akan diikuti pendidikan menengah di DIY. Meski demikian, Pemda DIY akan melihat untung rugi pembelajaran tatap muka dengan lebih dahulu mengevaluasi kesiapan masing-masing sekolah, perilaku anak, perilaku keluarga terhadap protokol kesehatan.

Menurut Aji, Pemda DIY tidak tergesa-gesa dalam merespons keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 dengan izin pemda. "Kita tidak tergesa-gesa untuk merespons dibolehkan. Itu (belajar tatap muka) boleh, tetapi tetap masing-masing daerah harus mengacu pada penilaian (risiko penularan)," kata dia.

(ANTARA)

Simulasi Vaksinasi COVID-19 Agar Terus Dilakukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan simulasi vaksinasi virus corona jenis baru (COVID-19) terus dilakukan secara optimal di berbagai daerah.

"Kemarin saya lihat simulasi vaksinasi di lapangan sudah baik dan saya minta simulasi terus dilakukan," kata dia di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kabinet terbatas dengan topik 'Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Ia menyatakan rencana lanjutan untuk pengecekan simulasi tersebut. "Saya akan mengecek 1-2 kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik," kata dia.

Presiden Jokowi pada Rabu (18/11) meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal 'Harapan Keluarga' Kota Bogor. "Paling

penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin, yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," ungkap dia.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi juga meminta laporan tentang perkembangan pembelian vaksin COVID-19. "Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah prosesnya mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata dia.

Presiden Jokowi juga meminta laporan terkait dengan proses distribusi dan pengajuan izin ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen, baik yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk 'cold chain', 'seller'-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan 'Emergency Use Authorization' seperti apa," ungkap Presiden.

(ANTARA)

Presiden Minta Satgas-Gubernur Seimbangkan Urusan Pandemi dan Ekonomi

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta Komite dan Satgas Penanganan COVID-19 beserta seluruh gubernur di Tanah Air menyeimbangkan dengan baik urusan penanganan pandemi COVID-19 dan ekonomi.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11).

"Saya ingin mengingatkan kembali kepada komite, satgas dan seluruh gubernur agar betul-betul bisa mengatur urusan yang berkaitan dengan COVID-19 dan urusan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam sebuah keseimbangan yang baik," ujar dia sebagaimana disaksikan secara virtual.

Presiden mengatakan strategi mengatur keseimbangan 'rem dan gas' mulai terlihat, terutama dalam pengendalian, baik COVID-19 maupun ekonomi.



ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am
Presiden Joko Widodo

Kepala Negara menyampaikan per 22 November 2020 rata-rata kasus aktif COVID-19 di seluruh Tanah Air 12,78 persen atau lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yaitu 28,41 persen.

Tren rata-rata kesembuhan juga membaik, yakni sudah mencapai 84,03 persen atau lebih baik dari angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,20 persen. "Kemudian di bidang ekonomi sudah saya sampaikan minggu yang lalu tren di kuartal kedua dari minus 5,32, membaik di kuartal ketiga minus di 3,49. Ini juga harus terus kita perbaiki agar di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga," kata Presiden.

Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi meminta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja menjadi perhatian. "Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak," kata dia.

Presiden melihat realisasi anggaran beberapa program sudah berjalan dengan baik, misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82 persen dan banpres produktif untuk bantuan modal kerja usaha mikro sudah mencapai 79 persen.

"Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

(ANTARA)

Menkeu: Pendidikan Tetap Jadi Prioritas Pemerintah di Tengah Pandemi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bidang pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami tekanan akibat dampak COVID-19.

"Pendidikan kegiatan luar biasa penting jadi meskipun di hadapkan dalam tantangan dan ancaman COVID-19 namun proses belajar mengajar seharusnya tetap bisa dilaksanakan," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (23/11).

Sri Mulyani mengatakan dorongan pemerintah untuk bidang pendidikan di tengah pandemi tercermin melalui berbagai alokasi anggaran seperti Rp 2,94 triliun untuk gaji guru honorer di Kemendikbud dan Rp 2,08 triliun di Kemenag.

Kemudian Rp 2,61 triliun untuk pesantren agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilakukan

meskipun memakai protokol kesehatan, Rp 5,5 triliun subsidi internet bagi pelajar siswa dan mahasiswa, dan Rp 1,16 triliun bantuan internet untuk guru di Kemenag.

Ia merinci bantuan internet diberikan sebesar 20 GB per bulan untuk PAUD, 35 GB per bulan untuk SD hingga SMA, 42 GB per bulan untuk 6 juta mahasiswa, dan 50 GB per bulan untuk 3,8 juta dosen maupun guru. "Keseluruhan dana ini menggunakan anggaran mencapai lebih dari Rp 6,66 triliun hanya untuk internet," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan subsidi upah bagi 1,6 juta tenaga pendidik nonPNS di lingkungan Kemendikbud dan 800 ribu di lingkungan Kemenag sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 3,66 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk ber-

bagai kegiatan rehabilitasi seperti SD dan SMP untuk 528 sekolah, 226 madrasah dan sekolah keagamaan, serta pembangunan 24 asrama dan 25 ruang belajar pondok pesantren.

Selain itu, pemerintah memberikan beasiswa mulai program Indonesia Pintar kepada 15,95 juta pelajar siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan untuk 736 ribu orang mahasiswa yang ikut dalam beasiswa bidik misi atau kartu Indonesia kuliah.

Sementara di lingkungan Kemenag diberikan bantuan operasi sekolah untuk 7,6 juta siswa dan bantuan operasi pesantren untuk 193 ribu lembaga yang memiliki 14,2 juta siswa pesantren. "Ini sesuatu pemihakan karena memang anggaran pendidikan itu anggaran paling besar di belanja negara yaitu 25 persen atau lebih dari Rp 500 triliun," tegasnya.

(ANTARA)

Pemda DIY Minta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Diperketat

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta penegakan hukum protokol kesehatan diperketat seiring masih tingginya kasus penularan COVID-19 di daerah ini disertai menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

"Operasi-operasi penegakan hukum harus kita perkuat karena ada kecenderungan masyarakat sudah mulai lalai untuk menjaga protokol kesehatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadaranta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (23/11).

Menurut dia, Pemda DIY membuka peluang meningkatkan penerapan sanksi, yakni dari sanksi sosial menjadi sanksi denda terhadap para pelanggar protokol kesehatan.

Selama ini, sanksi sosial telah



FOTO ANTARA/Luqman Hakim
Sekda DIY K Baskara Aji

ditegaskan Satpol PP DIY kepada para pelanggar protokol kesehatan mengacu Peraturan Gubernur DIY

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pengendalian COVID-19. Sanksi sosial itu, di antaranya berupa menyapu jalan, menyanyi, hingga 'push up'.

"Saya kira dari yang disampaikan Pak Gubernur DIY (dalam Pergub) kemudian dirinci di tingkat kabupaten/kota, saya kira kabupaten/kota bisa memberikan sanksi sosial maupun sanksi finansial," kata Aji.

Selain berkaitan dengan sanksi, Pemda DIY juga akan melakukan pengecekan terhadap kondisi kesiapan shelter dan rumah sakit terhadap penanganan pasien COVID-19 yang saat ini jumlahnya lebih banyak. "Kalau memang nanti diperlukan kita akan tambah shelter," kata Baskara Aji.

(ANTARA)

Bupati Temanggung Ingatkan Warga Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

TEMANGGUNG - Bupati Temanggung M Al Khadziq meminta warga setempat disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penularan COVID-19.

"Saya tegaskan pada masyarakat bahwa COVID-19 ini benar-benar ada di masyarakat dan benar-benar berbahaya, sudah banyak kasus orang meninggal karena COVID-19 di masyarakat," katanya di Temanggung, Senin (23/11).

Ia berharap, masyarakat tetap disiplin pada protokol kesehatan, jangan menganggap sepele terhadap pandemi. Ia menyebutkan

kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah, bahkan meningkat drastis pada akhir-akhir ini. Namun, Temanggung masih zona oranye.

"Temanggung sekarang masih di zona oranye, rumah sakit kita masih mampu menampung pasien COVID-19, karena kebanyakan yang terkonfirmasi positif ini tanpa gejala sehingga mereka melaksanakan karantina mandiri di rumah masing-masing," katanya.

Khadziq menyampaikan karena masih zona oranye maka dunia pendidikan juga belum diizinkan dibuka sesuai peraturan Menkes. "Kita baru melakukan simulasi pembelajaran tatap muka dengan

kebiasaan baru dan simulasi ini kita laksanakan di semua kecamatan dan semua tingkat pendidikan baik PAUD/TK, SD maupun SMP," katanya.

Ia berharap, COVID-19 segera berakhir dan masyarakat sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru.

Terkait dengan peningkatan kasus COVID-19, pihaknya sedang menggalakkan tes usap sesuai perintah Gubernur Jateng, yakni 10 persen dari jumlah penduduk harus dites usap atau dalam satu minggu harus melakukan tes usap sekitar 700-800 orang.

(ANTARA)

ANTARA NEWS

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru dan tenaga kependidikan nonPNS atau honorer baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Bantuan yang diberikan sebanyak satu kali itu diharap dapat meningkatkan kemampuan ekonomi.

BANTUAN SUBSIDI UPAH TENAGA KEPENDIDIKAN NONPNS

TARGET PENERIMA 2.034.732 orang

- 162.277 Dosen PTN/PTS
- 1.634.832 Guru negeri/swasta
- 237.623 Tenaga perpustakaan, umum dan administrasi

PENERIMA BSU

- Dosen
- Guru
- Guru yang bertugas sebagai kepala sekolah
- Pendidik PAUD
- Pendidik kesetaraan
- Tenaga perpustakaan
- Tenaga laboratorium
- Tenaga administrasi

(untuk sekolah negeri/swasta)

Anggaran Rp3,6 triliun

Besaran BSU Rp1,8 juta per orang

KRITERIA PENERIMA BSU

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berstatus nonPNS
- Berpenghasilan di bawah Rp5 juta/bulan.
- Tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan.

MEKANISME PENCAIRAN BSU

Informasi Pencairan

- Kemendikbud membuat rekening untuk setiap PTK* penerima BSU.
- PTK mengakses info GTK* di: info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Dokumen Persyaratan

- KTP
- NPWP
- SK Penerima BSU
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM)

Aktivasi Rekening

- PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan ke bank penyalur.
- PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021.

*GTK = Guru atau Tenaga Kependidikan
*PTK = Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DATA: KEMENDIKBUD Riset, MOENG FOTO: ANTARA GRAFIS: ERIE GAMBAR: SHUTTERSTOCK EDITOR: BAYU